

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau, menawarkan kekayaan alam yang melimpah dan beragam. Sekitar 7.000 pulau di antaranya dihuni oleh penduduk, dengan pulau-pulau utama seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua yang menjadi pusat kehidupan masyarakat. Sebagai negara berkembang yang terletak di wilayah tropis, Indonesia tidak hanya kaya dengan sumber daya alam yang melimpah tetapi juga keindahan alam, kekayaan budaya, dan warisan sejarah yang menjadikannya salah satu destinasi wisata unggulan dunia. Beragam potensi ini dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menarik minat wisatawan lokal maupun mancanegara untuk menjelajahi pesona alam dan budaya yang unik di setiap sudut nusantara.

Pariwisata telah menjadi industri yang berperan signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memperbaiki taraf hidup masyarakat. Sebagai sektor yang berkembang pesat, setiap daerah di Indonesia memiliki potensi yang dapat dikembangkan, baik melalui atraksi alam, budaya, maupun buatan manusia. Banyak peluang pariwisata di berbagai daerah yang belum sepenuhnya dimanfaatkan, namun memiliki potensi besar untuk dieksplorasi, dikelola, dan dikembangkan guna memenuhi kebutuhan serta meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.



Gambar 1. Data kunjungan wisatawan ke Indonesia tahun 2024

Menurut data BPS Juni 2024, kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia pada April 2024 mencapai 1,07 juta, meningkat 2,41% dari Maret dan 23,23% dari April 2023. Wisman didominasi oleh turis asal Malaysia, Australia, dan Tiongkok. Secara kumulatif, kunjungan wisman Januari–April 2024 naik 24,85% dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu, perjalanan wisatawan nusantara (wisnas) pada April 2024 mencapai 756 ribu, meningkat 9,28% dari Maret dan 33,13% dari April 2023. Data ini mencerminkan peningkatan minat wisata ke Indonesia dari dalam dan luar negeri.

Saat ini, Indonesia tengah melaksanakan agenda pembangunan nasional sebagai upaya strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Salah satu sektor yang menjadi fokus utama adalah pariwisata, yang terus dibangun dan dikembangkan oleh pemerintah. Arah kebijakan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menegaskan pentingnya perencanaan pembangunan partisipatif dan aspiratif melalui pendekatan *bottom-up*. Pergeseran paradigma ini menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai aktor kunci dalam proses pembangunan pariwisata. Dengan demikian, pengembangan sektor ini diharapkan dapat berjalan lebih inklusif serta berkelanjutan.

Sejalan dengan itu, visi pembangunan yang dirumuskan dalam *Astacita* Presiden Prabowo menekankan pentingnya membangun dari sektor terkecil, yakni desa, sebagai fondasi pembangunan nasional. Pendekatan ini menegaskan bahwa penguatan desa akan menciptakan basis ekonomi yang lebih tangguh, sekaligus meningkatkan daya saing pariwisata lokal. Dengan memprioritaskan pembangunan desa wisata, strategi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam peta pariwisata global.

Sumatera Barat dikenal sebagai provinsi yang memiliki beragam destinasi wisata alam, mulai dari pantai, danau, hingga sungai yang menyimpan potensi besar untuk dikembangkan. Keunikan dan keberagaman bentang alam di daerah ini telah menjadikan sejumlah lokasi sebagai destinasi wisata populer yang menarik minat wisatawan.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan sektor pariwisata, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp11,3 miliar melalui skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK) pada tahun 2023. Meskipun kewenangan utama ada pada pemerintah kabupaten/kota, Pemprov turut berperan dengan menanggung 40 persen anggaran, sementara sisanya menjadi tanggung jawab daerah penerima. Bantuan ini mencakup wilayah seperti Tanah Datar, Sijunjung, Pasaman, Agam, Sawahlunto, dan Pariaman, dengan total dukungan pengembangan pariwisata mencapai Rp29,5 miliar sebagai upaya meningkatkan daya saing pariwisata dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kunjungan wisatawan ke Sumatera Barat meningkat signifikan, mencapai 8.980 orang pada periode Januari 2023 hingga Februari 2024, naik tajam dibanding dua tahun sebelumnya yang hanya mencatat 4.144 kunjungan. Kenaikan ini menunjukkan pertumbuhan positif sektor pariwisata dan meningkatnya daya tarik destinasi di wilayah tersebut.

Beberapa wilayah seperti Kota Padang, Bukittinggi, dan Tanah Datar terus mengokohkan posisinya sebagai destinasi wisata unggulan di Sumatera Barat. Di sisi lain, Kabupaten Padang Pariaman turut memberikan kontribusi signifikan melalui pengembangan wisata religi dan ekowisata, salah satunya melalui Desa Wisata Nyarai yang dikenal dengan pesona alam hutan dan air terjun, serta pendekatan wisata petualangan berbasis potensi lokal.

Secara geografis, Kabupaten Padang Pariaman memiliki luas 1.342,27 km² dan terletak strategis di pesisir barat Sumatera, berbatasan langsung dengan Kota Padang. Dengan garis pantai sepanjang 60,5 km yang membentang hingga perbukitan Bukit Barisan, wilayah ini memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata terpadu. Pusat pemerintahan kabupaten berada di Parit Malintang, yang juga berfungsi sebagai pusat pengembangan wilayah.

Tabel 1. Kunjungan Wisatawan Pada Daya Tarik Wisata (DTW) Berbayar Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat

Kabupaten / Kota	2021	2022	2023
Kab. Kepulauan Mentawai	318	5	14
Kab. Pesisir Selatan	354.297	212.881	1.316.340
Kab. Solok	703.300	555.943	1.669.161
Kab. Sijunjung	60.533	121.613	241.236
Kab. Tanah Datar	340.363	642.717	1.108.151
Kab. Padang Pariaman	100.144	243.283	227.131.
Kab. Agam	509.428	82.254	58.410
Kab. Lima Puluh Kota	624.155	749.034	630.226
Kab. Pasaman	11.812	20.175	13.875
Kab. Solok Selatan	61.199	151.909	92.521
Kab. Dharmasraya	54.908	126.596	178.499
Kab. Pasaman Barat	23.503	433.405	391.999
Kota Padang	376.534	286.093	1.199.833
Kota Solok	181.154	100.373	217.252
Kota Sawah Lunto	91.027	140.986	254.396
Kota Padang Panjang	215.073	261.044	254.985
Kota Bukittinggi	748.074	1.231.306	1.161.812
Kota Payakumbuh	77.747	48.384	35.181
Kota Pariaman	252.317	209.003	218.215
Provinsi Sumatera Barat	4.785.886	5.617.004	11.234.179

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman dalam Angka 2024, BPS, 2024.

Berdasarkan data kunjungan wisatawan ke destinasi wisata berbayar (DTW) di Kabupaten Padang Pariaman yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat, terlihat adanya tren peningkatan signifikan selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021, jumlah kunjungan wisatawan tercatat sebanyak 100.144 orang, melonjak drastis pada tahun 2022 menjadi 243.283 kunjungan, meskipun sedikit menurun pada tahun 2023 menjadi 227.131 orang. Meskipun terjadi penurunan di tahun terakhir, angka ini tetap menunjukkan performa yang kuat dan menempatkan Padang Pariaman sebagai salah satu kabupaten dengan tingkat kunjungan yang kompetitif di Sumatera Barat.

Jika melihat tren regional, terdapat pergeseran pola kunjungan wisatawan dari wilayah-wilayah pegunungan ke destinasi pesisir. Beberapa daerah dengan

dominasi objek wisata berbasis pegunungan seperti Kabupaten Lima Puluh Kota, Tanah Datar, dan Kabupaten Agam yang sebelumnya mencatat angka kunjungan tinggi pada 2021 (masing-masing 624.155; 340.363; dan 509.428 kunjungan) mengalami penurunan cukup tajam pada 2023 (menjadi 630.226; 1.108.151; dan 58.410 kunjungan). Sebaliknya, daerah-daerah pesisir seperti Padang Pariaman dan Pesisir Selatan justru menunjukkan tren kenaikan kunjungan. Pesisir Selatan mengalami lonjakan dari 354.297 (2021) menjadi 1.316.340 (2023), sementara Padang Pariaman meningkat dari 100.144 (2021) menjadi 227.131 (2023), meski sempat lebih tinggi pada 2022.

Fenomena bergesernya preferensi wisatawan dari destinasi pegunungan ke wilayah pesisir mencerminkan kebutuhan akan pengalaman wisata yang lebih variatif dan terintegrasi dengan unsur alam, budaya, serta keterlibatan sosial. Perubahan ini tidak hanya menjadi indikasi tren konsumen dalam sektor pariwisata, tetapi juga membuka peluang baru bagi daerah-daerah yang memiliki potensi geografis dan ekologis yang sebelumnya kurang tereksplorasi. Dalam hal ini, wilayah pesisir seperti Kabupaten Padang Pariaman yang memiliki lanskap dari perbukitan Bukit Barisan hingga garis pantai yang panjang, menjadi kawasan strategis yang memiliki daya tarik tersendiri. Keberadaan destinasi seperti Pantai Gandoriah, Pantai Tiram, serta kawasan konservasi mangrove dan estuaria memberikan landasan kuat bagi pengembangan model pariwisata yang tidak hanya bersifat rekreatif, tetapi juga edukatif dan partisipatif.

Melihat peluang tersebut, pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata di Padang Pariaman diarahkan tidak semata-mata pada eksploitasi sumber daya alam untuk menarik wisatawan, tetapi juga menekankan pada pendekatan pembangunan berbasis masyarakat (*community-based tourism*). Model ini menempatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama dalam pengelolaan destinasi, mulai dari penyediaan layanan wisata, pengelolaan lingkungan, hingga pelestarian budaya lokal. Partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pariwisata memungkinkan terciptanya hubungan timbal balik antara sektor wisata dan pembangunan sosial-ekonomi masyarakat. Ketika masyarakat terlibat langsung dalam rantai nilai pariwisata, maka keuntungan yang dihasilkan tidak hanya dinikmati oleh pelaku usaha besar atau luar daerah, tetapi juga dirasakan secara langsung oleh komunitas lokal melalui

peningkatan pendapatan, pembukaan lapangan kerja, dan tumbuhnya unit-unit usaha kecil berbasis ekonomi kreatif.

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah menunjukkan komitmen strategis dalam membangun sektor pariwisata sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah. Pendekatan yang diambil mencakup pengembangan infrastruktur pendukung, promosi destinasi unggulan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, fasilitasi kelembagaan lokal, dan pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Strategi ini merefleksikan paradigma pembangunan pariwisata berkelanjutan, yang tidak semata-mata mengejar angka kunjungan wisatawan, melainkan mengedepankan aspek kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal (UNWTO, 2018). Dengan menciptakan ekosistem pariwisata yang inklusif, pemerintah daerah berupaya agar manfaat dari sektor ini dapat dirasakan secara merata oleh seluruh elemen masyarakat.

Pariwisata di Padang Pariaman diposisikan tidak sekadar sebagai pelengkap pembangunan, tetapi sebagai sektor yang memiliki daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi berbasis lokal. Interaksi antara potensi alam, budaya lokal, partisipasi aktif masyarakat, serta dukungan kebijakan publik menjadi faktor kunci dalam mendorong lahirnya model pembangunan pariwisata yang responsif dan adaptif. Menurut Tosun (2000), partisipasi masyarakat merupakan dimensi esensial dalam mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkeadilan dan berkelanjutan, terutama di wilayah pedesaan yang sering kali menghadapi tantangan ketimpangan pembangunan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus menciptakan ruang partisipatif dan memperkuat kapasitas kelembagaan lokal agar masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek dalam pembangunan.

Salah satu wujud konkret dari pendekatan partisipatif tersebut adalah pengembangan desa wisata. Desa wisata merupakan bentuk pemanfaatan ruang perdesaan yang memiliki keunikan budaya dan potensi alam sebagai daya tarik wisata yang dikelola oleh masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini, desa wisata tidak hanya menjadi destinasi, tetapi juga mencerminkan tata kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat lokal. Nuryanti (1993) menekankan bahwa desa wisata adalah integrasi antara atraksi wisata, akomodasi, dan kehidupan lokal yang autentik. Selain itu, konsep Community-Based Tourism

(CBT) sebagaimana dikemukakan oleh Suansri (2003) menggarisbawahi pentingnya pengelolaan berbasis masyarakat agar nilai-nilai sosial dan budaya tidak tergerus oleh komersialisasi semata, melainkan menjadi modal sosial yang memperkuat identitas lokal.

Di Kabupaten Padang Pariaman, kebijakan pengembangan desa wisata telah mendapatkan landasan yuridis melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) 2018–2026. Melalui regulasi ini, pemerintah daerah menetapkan arah strategis pengelolaan potensi wisata, khususnya di kawasan yang memiliki kekayaan ekologi dan budaya, seperti wilayah pesisir dan hutan. Pendekatan kolaboratif yang melibatkan unsur pemerintah, masyarakat, dan mitra pembangunan menjadi kunci keberhasilan program ini. Scheyvens (1999) menegaskan bahwa keberhasilan pariwisata berbasis komunitas ditentukan oleh sejauh mana masyarakat memperoleh manfaat nyata, mengakses sumber daya, dan memiliki suara dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, desa wisata di Padang Pariaman diharapkan menjadi instrumen pembangunan yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial dan kultural.

Salah satu desa wisata yang telah berkembang di Kabupaten Padang Pariaman adalah Desa Wisata Nyarai yang terletak di kawasan hutan Gamaran, Kecamatan Lubuk Alung. Kawasan ini dikenal memiliki bentang alam yang khas, terdiri dari hutan tropis, aliran sungai, serta air terjun Nyarai yang menjadi daya tarik utama. Aktivitas wisata di kawasan ini mengedepankan konsep ekowisata petualangan dan pemanfaatan lingkungan secara berkelanjutan. Dalam proses pengelolaannya, terdapat keterlibatan sejumlah unsur masyarakat dalam berbagai kegiatan wisata, seperti penyediaan jasa pemandu, pengelolaan jalur wisata, hingga penyajian kuliner lokal. Pola-pola keterlibatan ini menjadi bagian penting dalam memahami dinamika pengembangan pariwisata yang berbasis masyarakat

Pengembangan desa wisata merupakan proses perencanaan, pengelolaan, dan promosi berkelanjutan sebuah desa atau kawasan pedesaan yang bertujuan meningkatkan daya tarik pariwisata, infrastruktur, pemberdayaan masyarakat lokal, serta kesejahteraan ekonomi masyarakat, dengan tetap memperhatikan pelestarian lingkungan, pemeliharaan budaya lokal, dan penciptaan atraksi wisata yang menarik (BPSDM Kementerian Pariwisata RI, 2019). Dalam

konteks Kabupaten Padang Pariaman, partisipasi masyarakat memiliki peran penting sebagai pelaku utama dalam pengelolaan dan pengembangan desa wisata, karena keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan tidak hanya menjadikan program lebih responsif terhadap kebutuhan lokal, tetapi juga memastikan keberlanjutan pengembangan pariwisata secara keseluruhan.

Pengembangan desa wisata adalah suatu instrumen strategis dalam meningkatkan kapabilitas destinasi pariwisata, memperbaiki kualitas infrastruktur, dan secara fundamental meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat pedesaan. Proses ini melibatkan serangkaian aktivitas perencanaan, pengelolaan, dan promosi yang bersifat berkelanjutan, dengan tujuan utama untuk memberdayakan komunitas lokal, melestarikan warisan budaya, dan menjaga integritas lingkungan alam. Sebagaimana dijelaskan oleh BPSDM Kementerian Pariwisata RI (2019), tujuan komprehensif dari pengembangan desa wisata adalah menciptakan ekosistem pariwisata yang tidak hanya menarik pengunjung, tetapi juga memberikan manfaat multidimensional bagi penduduk setempat. Dalam kerangka ini, partisipasi masyarakat menjadi elemen yang tak terpisahkan dan fundamental, mengingat bahwa keterlibatan aktif mereka sebagai aktor utama akan menjamin responsivitas program terhadap kebutuhan spesifik lokal serta keberlanjutan jangka panjang sektor pariwisata.

Fenomena umum yang seringkali membedakan antara desa wisata yang sukses dan yang tidak berkembang adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi pariwisata. Desa-desa yang belum menunjukkan kemajuan signifikan kerap dihadapkan pada kendala rendahnya keterlibatan warga. Banyak masyarakat cenderung menganggap bahwa inisiatif dan tanggung jawab pengembangan pariwisata sepenuhnya berada di pundak pemerintah, sehingga minimnya inisiatif dalam kontribusi nyata seperti penyediaan layanan wisata, perawatan fasilitas, atau promosi destinasi. Akibatnya, desa-desa ini kesulitan menarik jumlah wisatawan yang memadai untuk menopang perekonomian lokal secara efektif. Sebaliknya, keberhasilan pengembangan desa wisata sangat bergantung pada kesadaran dan inisiatif kolektif masyarakat itu sendiri.

Keberhasilan implementasi program desa wisata sangat erat kaitannya dengan sinergi antara masyarakat lokal dan lembaga pendukung. Peran

lembaga lokal seperti Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) menjadi krusial dalam mengelola berbagai aspek pendukung pariwisata, mulai dari pengadaan sarana dan prasarana hingga strategi promosi destinasi. Partisipasi aktif masyarakat termanifestasi dalam beragam kegiatan wisata berbasis pengalaman, seperti pengelolaan homestay yang dikelola langsung oleh penduduk lokal, penyediaan layanan pemandu wisata yang berpengetahuan, serta pelaksanaan inisiatif konservasi lingkungan yang didorong oleh kesadaran komunitas. Pola kolaborasi semacam ini tidak hanya menciptakan pengalaman yang otentik bagi wisatawan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi dan sosial yang signifikan bagi kehidupan masyarakat lokal.

Studi ini akan memfokuskan analisis pada Desa Wisata Nyarai, Nagari Salibutan, yang terletak di Kabupaten Padang Pariaman. Desa ini dipilih mengingat potensi substansial yang dimilikinya untuk pengembangan pariwisata berbasis komunitas. Berdasarkan pandangan Mardikanto (2013:88), keberhasilan pengembangan desa wisata mensyaratkan adanya keterlibatan masyarakat pada berbagai tingkatan, mulai dari partisipasi pasif hingga partisipasi aktif yang bersifat mandiri.

B. Rumusan Masalah

Pengembangan desa wisata merupakan salah satu strategi penting dalam mendorong pembangunan berbasis potensi lokal. Namun, tingkat keberhasilannya berbeda-beda di setiap daerah, yang dapat dilihat melalui variasi jumlah kunjungan wisatawan dalam beberapa tahun terakhir. Di Kabupaten Padang Pariaman, Desa Wisata Nyarai di Nagari Salibutan muncul sebagai destinasi unggulan karena memiliki kekhasan geografis, kekayaan budaya, serta dinamika pengelolaan pariwisatanya.

Sejumlah faktor dianggap berperan dalam menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke desa ini. Potensi alam, nilai sejarah, serta kekayaan budaya menjadi daya tarik utama yang didukung oleh tingkat partisipasi masyarakat dalam mengelola dan mempromosikan destinasi. Keterlibatan warga, baik secara individu maupun melalui kelembagaan formal seperti Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), memegang peranan vital. Partisipasi tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari

penyediaan fasilitas dan layanan wisata hingga menjaga kelestarian lingkungan.

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sendiri telah menempatkan sektor pariwisata sebagai salah satu prioritas pembangunan, dengan tujuan utama memberikan manfaat nyata bagi kemajuan ekonomi daerah. Selain membangun infrastruktur dan meningkatkan kualitas pengelolaan, pemerintah juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap pengembangan. Pendekatan yang berbasis pada kearifan lokal ini diharapkan mampu menciptakan model pengelolaan pariwisata yang selaras dengan potensi dan karakteristik khas wilayah.

Namun, dari 32 desa yang telah ditetapkan sebagai desa wisata oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2019, hingga Agustus 2025 tercatat hanya 5 desa wisata yang masih aktif, dan dari jumlah tersebut hanya satu desa yang menunjukkan perkembangan signifikan, yaitu Desa Wisata Nyarai. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberlanjutan desa wisata sangat bergantung pada sejauh mana pengelolaannya didasarkan pada kebutuhan masyarakat setempat. Dengan demikian, keterlibatan aktif masyarakat menjadi kunci penting agar pengembangan desa wisata benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi lokal. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini berupaya untuk menjawab beberapa permasalahan yang terkait dengan pengembangan desa wisata di wilayah studi. Fokus utama penelitian ini terbagi menjadi:

1. Apa saja potensi wisata dan daya tarik yang di miliki Desa Wisata Nyarai?
2. Bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Nyarai?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang diuraikan di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan potensi dan daya tarik yang di miliki Desa Wisata Nyarai?

2. Untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata di Desa Wisata Nyarai?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister pada Program Studi Pembangunan Wilayah dan Pedesaan, Universitas Andalas. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kajian akademis terkait pembangunan wilayah dan pedesaan, khususnya dalam konteks pengembangan desa wisata. Dengan memfokuskan penelitian pada Desa Wisata Nyarai, Nagari Salibutan, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman., penelitian ini memberikan perspektif mendalam mengenai keterlibatan masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam proses pembangunan desa wisata.

Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah yang relevan bagi mahasiswa, peneliti, maupun akademisi yang tertarik pada isu pembangunan pariwisata berbasis masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademis terkait partisipasi masyarakat dalam pengembangan wilayah berbasis pariwisata, yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya. Dengan demikian, penelitian ini juga diharapkan dapat membuka ruang diskusi baru dalam mendorong sinergi antara pembangunan pedesaan dan sektor pariwisata.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat, pemangku kepentingan, dan pembaca umum mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa wisata. Studi yang dilakukan di Desa Wisata Nyarai, Nagari Salibutan, Kecamatan Lubuk Alung dapat menjadi contoh nyata bagaimana masyarakat lokal dapat berperan aktif dalam merancang, mengelola, serta mengembangkan potensi desa wisata secara berkelanjutan. Melalui penelitian ini, masyarakat diharapkan semakin menyadari peran strategis mereka dalam pengembangan wilayah pedesaan dan dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan tersebut.

Lebih jauh, penelitian ini memberikan rekomendasi yang dapat digunakan

oleh pemerintah daerah, pengelola desa wisata, serta pihak terkait lainnya untuk memperkuat strategi pembangunan desa wisata. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan pariwisata yang berorientasi pada keberlanjutan dan kearifan lokal, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun budaya.

